

COMPANY PROFILE

Research Centre for
Politics and Government
(PolGov)



**RESEARCH
CENTRE FOR
POLITICS AND
GOVERNMENT**

Knowledge

Entrepreneurship Center

DAFTAR

ISI

Tentang Kami	2
Nilai Organisasi	4
Visi dan Misi	5
Jejak Langkah Kelembagaan PolGov	6
Jejak Langkah Polgov	8
Tim Kami	18
<i>Interest and Expertise</i>	20
<i>Big Data Analytics</i>	24
Media dan Publikasi	26
Mengintegrasikan Pengabdian Masyarakat	28
Mitra Kerja	31

The image shows a white rectangular sign mounted on a light-colored wall. The sign features the word "POLGO" in large, bold, orange 3D-style letters. Below it, the text "Research Center for Politics and Government" is written in a smaller, dark red font. The sign is partially cut off on the right side.

POLGO
Research Center for Politics and Government

TENTANG KAMI

Berdiri sejak 2009, Research Centre for Politics and Government (PolGov) merupakan lembaga yang ada di bawah manajemen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada. PolGov adalah lembaga yang berpengalaman dalam kerja riset, pengabdian masyarakat, dan advokasi isu politik dan pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, perubahan teknologi dan komunikasi yang terjadi sedemikian cepat berdampak pada perubahan relasi sosial, cara produksi dan konsumsi teknologi, serta munculnya nilai-nilai baru yang memungkinkan untuk mengolah sebuah aktivitas menjadi produk pengetahuan yang beraneka ragam.



PolGov hadir menjawab tantangan tersebut dengan visinya yakni “Knowledge Entrepreneurship Center”. Melalui konsep itu, PolGov berupaya mengolaborasikan kerja ilmiah berbasis riset dengan kecanggihan teknologi sehingga mampu memproduksi pengetahuan dalam berbagai platform yang dapat diakses oleh siapa saja dengan latar belakang yang beragam. Produksi pengetahuan juga didukung oleh modal sosial yang besar dan beragam. Oleh karenanya, PolGov senantiasa bersinergi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik di tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional. PolGov berkomitmen bahwa seluruh produk pengetahuan yang dihasilkan mampu berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat, menginspirasi

komunitas, memajukan pengetahuan di bidang politik dan pemerintahan, meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik oleh pemerintah.

Nama “PolGov” dipilih dengan merujuk ringkasan “politics” dan “government” yang merupakan landasan keilmuan seluruh kegiatan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan DPP. Kehadiran PolGov juga menandai model pengelolaan riset, advokasi, dan publikasi dalam satu lembaga. Penggabungan ketiganya membuat PolGov bukan lagi terbatas sebagai lembaga penelitian, tetapi sebagai knowledge center yang mendiseminasi berbagai produk pengetahuan yang berbasis riset.

Nilai Organisasi

Nilai Organisasi

“

PolGov mendedikasikan seluruh hasil kerja penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mendorong demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. “Humanizing politics” merupakan slogan yang senantiasa ditanamkan di setiap kegiatan riset, advokasi, dan publikasi sebagai bagian dari penerapan ilmu politik dan pemerintahan yang humanis. Selain itu, PolGov juga memegang teguh nilai-nilai dan menghargai inisiatif serta inovasi, kemampuan untuk memahami, kolaborasi dan adaptasi.

Visi & Misi

“

Visi PolGov yakni “Knowledge Entrepreneurship Center.” Melalui visi itu, PolGov ingin menghadirkan riset, advokasi, diseminasi, serta publikasi yang responsif, kreatif, dan transformatif di bidang ilmu politik dan pemerintahan.

JEJAK LANGKAH KELEMBAGAAN POLGOV

2009



PolGov berawal dari dua laboratorium yang dikelola secara terpisah oleh Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), yang dahulu masih bernama Jurusan Ilmu Pemerintahan/Jurusan Politik dan Pemerintahan (JIP/JPP) dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah/Ilmu Politik (PLOD/Ilmu Politik) FISIPOL UGM. Pada 2009, kedua laboratorium itu pun digabung dan menjadi satu unit terpadu dengan nama Research Center for Politics and Government atau dikenal dengan PolGov. Saat itu, PolGov menempati salah satu ruangan di Gedung Pusat Antar Universitas (PAU), Kocoran, Depok, Sleman.

2011



Sejak 2011, PolGov berpindah dari Gedung PAU dan menempati ruangan di Gedung BA, Lantai 4, FISIPOL, Bulaksumur.

2016

Tahun 2016 PolGov secara kelembagaan membagi kegiatan riset ke dalam lima topik kajian, yaitu; “Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi”, “Politik Desentralisasi”, “Tata Kelola Sumber Daya”, “Tata Kelola Pemilu” dan “Tata Kelola Perbatasan”. Kelima topik tersebut ditempatkan sebagai kerangka teoritis untuk menentukan lokus kajian yang sesuai dengan perkembangan keilmuan dan realitas politik kontemporer di Indonesia.

2019

Laboratorium Big Data Analytics merupakan laboratorium penelitian interdisipliner di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, yang berfokus pada pemanfaatan data dalam ilmu sosial (*Social Data Science*). Laboratorium yang berdiri sejak 2019 ini, dibangun atas kesadaran terhadap perkembangan teknologi informasi serta sebagai bentuk inovasi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian di era keberlimpahan informasi digital. Secara konsisten Laboratorium Big Data Analytics terus melakukan pengembangan, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun manajemen data. Laboratorium Big Data Analytics dapat melakukan berbagai tugas komputasi dan visualisasi untuk mendukung penelitian sosial dan politik dengan cepat dan efisien.

2021

Sedangkan pada 2021, dengan mempertimbangkan tantangan zaman, penetrasi teknologi dalam kehidupan manusia, perkembangan ilmu politik dan juga pola konsumsi pengetahuan masyarakat, PolGov memutuskan melakukan reorientasi misi dan visi lembaga. PolGov kemudian mengembangkan diri tidak lagi sebagai *knowledge center* tetapi menjadi *knowledge entrepreneurship center*.

Melalui misi dan visi yang baru ini, PolGov berkeinginan untuk menciptakan nilai tambah lain dan menjadi bagian integral dari hasil-hasil riset serta advokasi yang telah dilakukan. Nilai tambah ini merupakan pengembangan lain yang berbentuk audio visual di luar hasil publikasi cetak seperti laporan, buku, *policy brief* maupun monograf. Hasil pengembangan tersebut juga merupakan respons lembaga terhadap perkembangan teknologi dan juga cara warga mengonsumsi dan memproduksi pengetahuan.

JEJAK LANGKAH POLGOV

2006

Riset-riset pada tahun ini dilakukan sebelum pengembangan PolGov dan departemenisasi di fakultas-fakultas UGM. Riset-riset ini dikerjakan oleh embrio PolGov, yakni unit riset dan publikasi S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.

- Kerja sama dengan Bridge Bappenas UNDP untuk peningkatan manajemen partai politik dan parlemen. Kegiatan ini juga meliputi pembuatan modul dan rangkaian kegiatan pelatihan.
- Riset Keterlibatan Publik dalam Desentralisasi. Kerja sama dengan Bridge Bappenas UNDP ini melihat perkembangan CSO di pasca demokratisasi. Riset ini juga merupakan riset awal yang melihat perkembangan CSO di Indonesia, terlebih melihat permasalahan, dinamika dan prospeknya di Indonesia.

2007

Riset-riset pada tahun ini dilakukan sebelum pengembangan PolGov dan departemenisasi di fakultas-fakultas UGM. Riset-riset ini dikerjakan oleh embrio PolGov, yakni unit riset dan publikasi S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.

- Studi Fisibilitas Pemekaran Kabupaten Adonara dari Kabupaten Flores Timur. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur ini ditujukan untuk melihat fisibilitas pembentukan kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Flores Timur.
- Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta ini untuk melihat pengembangan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta setelah terbitnya peraturan pemerintah.

Riset-riset pada tahun ini dilakukan sebelum pengembangan PolGov dan departemenisasi di fakultas-fakultas UGM. Riset-riset ini dikerjakan oleh embrio PolGov, yakni unit riset dan publikasi S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.

- Evaluasi dan Pembentukan Institusi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah 41/2007): Kabupaten Sorong Selatan. Riset advokasi yang bekerja sama dengan Kabupaten Sorong Selatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yaitu EKPPD Kabupaten Sorong Selatan. Riset ini adalah untuk merekomendasikan institusi pemerintahan yang fisibel sekaligus mengadvokasikan kebutuhan kelembagaan untuk kabupaten baru.
- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD): Kabupaten Sorong Selatan 2006- 2008. Riset advokasi ini tidak semata dilakukan guna membantu daerah memenuhi kewajiban melengkapi dokumen daerah. Riset ini secara substantif membantu pemerintah daerah mendiskusikan tantangan-tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengidentifikasi poin-poin pengembangan.
- Studi fisibilitas pembentukan Kabupaten Muyu sebagai Pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Papua ini untuk melihat tantangan pembangunan di kawasan perbatasan Papua dengan Papua Nugini sekaligus fisibilitasnya untuk pembentukan daerah otonom baru.
- Penyusunan master plan pembangunan untuk Kabupaten Puncak. Riset advokasi ini dilakukan dengan dukungan administrasi dari PT Gama Multi UGM dengan Kabupaten Puncak. Kegiatan ini tidak semata untuk membuat dokumen pengembangan daerah, namun lebih dari itu sebagai bentuk kepedulian terhadap kabupaten baru di kawasan dengan bentang alam tertinggi di Indonesia.
- CSO Forum. Kerja sama dengan DRSP-USAID ini dilakukan untuk menghimpun masukan dari kalangan masyarakat sipil mengenai desain desentralisasi yang lebih tepat untuk Indonesia. Aktivitas ini dilakukan di lima kota yang mempertemukan mereka dari kawasan Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua, dan menjadi embrio dari kajian-kajian mengenai desentralisasi asimetris di departemen.
- Expert meeting: rethinking the structure and position of local parliament. Kerja sama dengan DRSP-USAID ini dilakukan dalam rangka diskusi ahli mengenai struktur dan posisi DPRD. Kegiatan ini menjadi rangkaian dari kegiatan serupa yaitu perumusan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu dari sudut pandang masyarakat sipil dan akademis. Kegiatan diskusi ini juga menghasilkan executive summary yang dikomunikasikan kepada pengambil kebijakan di pemerintahan pusat.

- Power Welfare and Democracy (PWD): Pilot Phase. 2009-2011. Proyek riset ini dilakukan oleh PolGov di dalam naungan UGM dan University of Oslo, didukung oleh Kedutaan Besar Norwegia. Riset pendahuluan ini merupakan tahapan pertama dari riset kedua yang dilakukan tahun 2011-2016.
- Studi Fisibilitas Pemekaran Lombok Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur. Riset ini dilakukan antara PolGov dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Riset ini untuk melihat fisibilitas pembentukan kabupaten Lombok Selatan sebagai bagian yang terpisah dari Kabupaten Lombok Timur.
- Pengembangan Desentralisasi Asimetris sebagai Model untuk Mengelola Relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Riset kerja sama dengan TiFA Foundation ini dilakukan sebelum pengembangan PolGov dan departemenisasi di lingkungan UGM, tepatnya saat unit riset dan publikasi masih bernaung di bawah S2 Ilmu Politik UGM. Riset ini merupakan bagian penting dari studi-studi desentralisasi asimetris di UGM guna mendiskusikan model-model relasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat mawadahi kekhususan sejumlah daerah.
- Studi Kelembagaan Pengembangan Terminal Giwangan sebagai Kawasan Transportasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Riset kerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta ini dilakukan sebelum pengembangan PolGov dan departemenisasi di lingkungan UGM, tepatnya saat unit riset dan publikasi masih bernaung di bawah unit riset S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. Riset ini untuk membantu pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan pengaktifan kembali sekaligus pengembangan terminal sehingga membantu peningkatan layanan transportasi sekaligus fungsi ekonomi dari terminal.
- Pilot Training Advokasi berbasis Bukti: menyinambungkan antara riset dan kebijakan. Riset kerja sama dengan Smeru, ODI-RAPID, dan DRSP-USAID ini dilakukan sebelum pengembangan PolGov dan departemenisasi di lingkungan UGM, tepatnya saat unit riset dan publikasi masih bernaung di bawah S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. Kegiatan ini dilakukan untuk merawat jejaring CSO di Yogyakarta melalui training advokasi berbasis bukti.

2010

- Studi Fisibilitas Pemekaran Sofifi dari Kota Tidore Kepulauan. Studi ini dilakukan atas kerja sama PolGov UGM dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Riset advokasi ini dilakukan untuk mengkaji fisibilitas untuk meningkatkan status Sofifi dari kelurahan menjadi kota guna menyiapkannya sebagai ibukota baru bagi Provinsi Maluku Utara menggantikan Ternate.

2011

- *Power Welfare and Democracy (PWD): Main Phase 2011-2016*. Proyek riset ini dilakukan oleh PolGov di dalam naungan UGM dan University of Oslo serta didukung oleh Kedutaan Besar Norwegia. Sebagai riset besar yang dilakukan secara *multi-years* (2011-2016; kelanjutan dari *pilot phase* tahun 2009-2011), Proyek PWD juga melibatkan departemen dan fakultas lain di UGM. Dilakukan di banyak daerah di Indonesia, Proyek PWD melibatkan jejaring luas dan menghasilkan banyak produk pengetahuan, termasuk: hasil survei, situs data, dan beberapa buku masing-masing mengenai rezim lokal, rezim kesejahteraan, dan kewarganegaraan. Proyek riset ini juga memberikan dukungan terhadap pengembangan studi melalui beasiswa S2 dan S3, dan pengembangan jurnal internasional PCD (Power, Conflict, and Democracy). Data yang dihasilkan dari riset besar ini juga mengilhami banyak penelitian lanjutan dan tulisan-tulisan lain yang dibuat oleh para akademisi yang terlibat di dalam kegiatan ini.

2014

- Perilaku Memilih dalam Masyarakat Patronase: kasus di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. Riset ini dikelola oleh PolGov namun dilakukan oleh sejumlah mahasiswa S1 terpilih sebagai pembelajaran bagi mereka. Riset ini melihat perilaku patronase di tiga kabupaten/kota di DIY.
- *Money Politics: Patronage, Clientelism and Electoral Dynamics in Indonesia*. Riset ini merupakan kerja sama antara PolGov UGM dengan Australian National University. Riset ini dilakukan di 15 daerah pemilihan seluruh Indonesia untuk melihat praktik patronase dan klientelisme dalam pemilu di Indonesia. Riset yang dilakukan dengan jejaring di daerah penelitian ini menghasilkan 1 buku bunga rampai yang diterbitkan dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia).

2015

- Memahami Tingkat Melek Politik di Kabupaten Sleman. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara PolGov UGM dengan KPU Sleman. Kajian ini dilakukan untuk menjawab apakah tingginya partisipasi politik warga Sleman dalam Pemilu 2014 disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang tinggi ataukah karena sebab lainnya.
- Peran Sayap Perempuan Parpol dalam Meningkatkan Representasi Perempuan dalam Politik. Riset yang dibiayai dengan Hibah Departemen Fisipol UGM memadukan antara riset oleh departemen dan penugasan mahasiswa. Riset ini dilakukan antara lain untuk melihat sejauh mana sayap perempuan partai politik di DIY berkontribusi dalam kemenangan dan peningkatan kapasitas politisi perempuan.
- Peningkatan Representasi Perempuan dalam Politik. Riset mini ini merupakan kerja sama antara PolGov UGM dengan International Republican Institute (IRI). Riset mini ini untuk melihat sejumlah isu seperti kandidasi, tantangan, model kampanye, dan anekdot tentang pemilu 2014.

2016

- Riset Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Presiden 2014. Riset ini merupakan kerja sama antara PolGov dengan Komisi Pemilihan Umum DIY. Ide riset ini berawal dari inisiatif untuk memanfaatkan data surat suara hasil pemilihan presiden 2014 sebelum dimusnahkan. Riset ini menghasilkan berbagai pola surat suara tidak sah, baik yang karena ketidaksengajaan maupun kesengajaan.
- Riset Pemilih DPKTb dalam Pemilu Presiden 2014 di Provinsi DIY Yogyakarta. Riset ini merupakan kerja sama antara PolGov UGM dengan KPU. Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.
- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan ini merupakan perpaduan antara riset dengan konsultasi yang dilakukan atas kerja sama antara PolGov UGM dengan Bappeda/Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini dalam rangka membantu pemerintah kabupaten mengidentifikasi persoalan daerah hingga merumuskannya dalam dokumen RPJMD yang akan diajukan oleh pemerintah daerah.

2017

- The 2017 Local Election in Indonesia. Riset ini merupakan kerja sama antara PolGov dengan ANU untuk menganalisis bagaimana praktik klientilisme, *programmatic politics* dan jaringan sosial bekerja dalam Pilkada 2017. Riset ini melibatkan berbagai akademisi dari berbagai universitas di Indonesia.
- Survei Perilaku Pemilih Masyarakat DIY. Survei ini bertujuan untuk memetakan perilaku pemilih di DIY menjelang Pemilihan Presiden 2019. Survei ini merupakan survei yang bersifat longitudinal, yang dilakukan dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Selain memetakan perilaku pemilih menjelang Pemilihan Presiden 2019, survei ini juga memetakan berbagai isu lokal di DIY.
- Riset Geo-Literacy: North Sulawesi as Maritime Frontier. Riset ini bertujuan untuk mengkaji transformasi interaksi, interkoneksi, dan implikasi posisi Nusa Utara sebagai *maritime frontier* dalam konteks Sulawesi Utara maupun secara Nasional. Riset ini menemukan bahwa wilayah Nusa Utara yang berposisi *frontier* masih dibatasi dengan pola kebijakan yang masih sangat *inward looking* dan berkarakter daratan
- Riset Managing The Border Beyond The Border Land. Riset ini menganalisis pengelolaan bandara dan pelabuhan dalam paradigma perbatasan dengan menggunakan studi kasus Bandara Kualanamu, Adisutjipto dan Pelabuhan Batam Centre. Riset ini bertujuan melihat sejauh mana kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan rezim pengelolaan perbatasan di wilayah bandar udara dan pelabuhan, untuk menjawab tantangan dunia yang *borderless*.

2018

- Riset Pembiayaan Politik di Pilkada 2018 Kota dan Kabupaten Madiun. Riset ini bertujuan untuk menganalisis pemasukan, pengeluaran, dan pengelolaan pembiayaan politik dalam pemilu. Riset ini menghasilkan temuan tentang dua mekanisme yakni formal dan informal, dalam pengelolaan pembiayaan politik.
- Head Village Election in Indonesia. Riset merupakan kerja sama antara PolGov dengan ANU dan KITLV yang juga merupakan kerja sama lanjutan dalam berbagai riset sebelumnya. Riset ini menganalisis praktik klientilisme, *programmatic politics* dan jaringan sosial dalam pemilihan kepala desa di DIY.

- Strategi Edukasi dalam Mengelola Radikalisme dan Penyebaran Hoaks. Project ini merupakan riset dan advokasi yang berlangsung selama dua tahun (2018-2019) hasil kerja sama antara PolGov dan Yayasan Tifa. Riset dan advokasi ini berupaya mendorong pengelolaan ancaman radikalisme dan penyebaran hoaks melalui strategi edukasional. Kegiatan ini melibatkan mitra daerah dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil di Jawa Barat dan Maluku.
- Inisiasi Big Data Laboratorium. Pembentukan *big data laboratorium* berawal atas kesadaran terhadap perkembangan teknologi informasi serta sebagai bentuk inovasi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian di era keberlimpahan informasi digital. Secara konsisten Laboratorium Big Data Analytics terus melakukan pengembangan, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun manajemen data.

2019

- Riset Peta Kerawanan Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta: Pengalaman Pemilu Serentak 2019. Riset ini merupakan kerja sama antara PolGov dan KPU DIY. Penelitian ini memetakan beberapa dimensi kerawanan pemilu berdasarkan pengalaman Pemilu Serentak 2019 di DIY. Penelitian ini tidak hanya melakukan pemetaan partisipasi pemilih, namun juga untuk melihat faktor apa saja yang membuat proses partisipasi itu bekerja.
- Women candidates and the 2019 Indonesian election. Riset ini merupakan kerja sama antara PolGov dan ANU. Riset ini bertujuan untuk memetakan peran perempuan dalam pemilu 2019, baik sebagai kandidat maupun tim pemenang.
- PolGov tergabung dalam koalisi bernama Konsorsium Ground Up. Konsorsium ini beranggotakan Universiteit of Amsterdam (UvA), IHE-Delft Belanda, Universitas Diponegoro (UNDIP), Amrta Institute, dan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) yang kegiatannya didanai oleh The Dutch Research Council (NWO). Koalisi ini berfokus pada penelitian tata kelola air di wilayah urban, baik air yang berada di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah dengan topik penelitian “Ground Up: A Practice Based Analysis of Groundwater Governance for Integrated Urban Water Resource Management in Semarang.”
- Woman Collective Action at the Village Level. Penelitian ini merupakan bentuk kolaborasi antara The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Penelitian ini dilakukan di 14 desa dan 12 kabupaten dan kota di sembilan provinsi—Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

2020

- Prioritas Riset Nasional. Proyek ini meliputi kegiatan penelitian dan advokasi kebijakan dalam isu desentralisasi dan demokrasi lokal (topik kelima PRN Penguatan Demokrasi Indonesia), yang berguna untuk mendorong pelembagaan keragaman praktik demokrasi lokal di Indonesia dengan ditandai oleh keberadaan lembaga informal. Pada tahun pertama kami melakukan studi pustaka dan penggalan data awal tentang karakter di masing-masing daerah penelitian. Luaran tahun pertama digunakan sebagai basis kegiatan tahun kedua. Di tahun kedua ini, kegiatan terdiri dari tiga bagian: a) perumusan draf instrumen gagasan demokrasi asimetris untuk ketujuh daerah *piloting*; b) pemetaan *stakeholder* untuk dijajaki dalam pembentukan konsorsium nasional gagasan demokrasi asimetris; dan c) *multimedia productions* untuk mendukung diseminasi gagasan demokrasi asimetris untuk khalayak umum. Untuk mendukung luaran tahun kedua, Tim Peneliti akan melakukan diseminasi dan pembentukan konsorsium nasional gagasan demokrasi asimetris di tujuh daerah penelitian, yakni Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Gorontalo, Jawa Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

2021

- PolGov mengelola dana hibah dari Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) lewat program Norwegian Program for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (NORHED) yang masuk dalam kegiatan penelitian bertema Climate Change and Natural Resources. Adapun kerja sama ini akan berlangsung dari 2021 sampai 2026. Selain untuk kepentingan riset, kerja sama ini juga meliputi pertukaran mahasiswa dan staf, beasiswa S2 dan S3, pengembangan kapasitas dan dukungan infrastruktur riset. Lewat program tersebut PolGov membangun jejaring dengan sejumlah universitas partner baik luar negeri maupun luar negeri. Diantaranya adalah Departemen of Geography, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Universitas Bangka Belitung, Universitas Nusa Cendana dan Politeknik Negeri Pontianak serta Departemen Geografi, UGM.
- Partisipasi Pemilih dalam Situasi Krisis Pandemi Covid-19: Pengalaman Pilkada 2020 di Indonesia. Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan tingginya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan kekhawatiran terhadap rendahnya partisipasi pemilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti sosio-ekonomi, kelembagaan, politik, serta risiko kesehatan dan penanganan pandemi mendorong peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 di

tengah pandemi. Selain itu peran berbagai aktor, seperti penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih, juga turut andil dalam peningkatan partisipasi pemilih.

- Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan kegiatan advokasi di dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik di sektor tambang. Kegiatan tersebut memiliki fokus untuk mempromosikan model *social accountability collaborative* atau akuntabilitas sosial kolaboratif di dalam mendorong perbaikan pada tata kelola perizinan di sektor tambang (*good mining practices*).
- Education, Democracy and the Legacy of Conflict: Prospects and Challenges of History and Civic Education in Indonesia. Bekerja sama dengan KU Leuven saat ini tengah mengelola program bertajuk “Education, Democracy and the Legacy of Conflict: Prospects and Challenges of History and Civic Education in Indonesia”. Program ini hadir didorong oleh kegelisahan akan adanya warisan konflik yang terjadi di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, sekolah dan guru memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya konflik, membangun perdamaian dan demokratisasi di Indonesia.
- Linking Institutional Activism to Popular Control: Case Study of Agrarian and Anti-Corruption Movement in Indonesia. Riset ini bermaksud melihat sejauh mana efektivitas Institutional Activism (IA), yaitu aktivisme yang dilakukan oleh para aktivis yang menyeberang menjadi bagian dari pemerintahan dan birokrasi, dalam mendukung popular control. Riset ini melihat praktik IA di dua sektor aktivisme yaitu antikorupsi dan reforma agraria. Dua sektor aktivisme ini dipilih dengan mempertimbangkan sejarah pembentukan sektor yang berbeda maupun keberadaan para aktivis yang menjadi bagian dari negara.

2021

Sedangkan pada 2021, dengan mempertimbangkan tantangan zaman, penetrasi teknologi dalam kehidupan manusia, perkembangan ilmu politik dan juga pola konsumsi pengetahuan masyarakat, PolGov memutuskan melakukan reorientasi misi dan visi lembaga. PolGov kemudian mengembangkan diri tidak lagi sebagai *knowledge center* tetapi menjadi *knowledge entrepreneurship center*.

Melalui misi dan visi yang baru ini, PolGov berkeinginan untuk menciptakan nilai tambah lain dan menjadi bagian integral dari hasil-hasil riset serta advokasi yang telah dilakukan. Nilai tambah ini merupakan pengembangan lain yang berbentuk audio visual di luar hasil publikasi cetak seperti laporan, buku, *policy brief* maupun monograf. Hasil pengembangan tersebut juga merupakan respons lembaga terhadap perkembangan teknologi dan juga cara warga mengonsumsi dan memproduksi pengetahuan.



TIM KAMI

TIM KAMI

Dari awal pembentukan PolGov, telah banyak terjadi perubahan serta adaptasi lembaga untuk menemukan ritme kerja yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan keilmuan terkini. Dalam perjalanannya PolGov mengalami berbagai penyesuaian kelembagaan, hingga terbentuk seperti saat ini. Tidak bisa dipungkiri juga, kelembagaan PolGov saat ini akan terus mengalami perkembangan untuk kemajuan PolGov dimasa mendatang.



Sebagai lembaga riset, selain terdiri dari peneliti yang merupakan penggerak utama, PolGov dikelola oleh Kepala PolGov dengan dibantu oleh Manajer. Kepala PolGov mempunyai fungsi sebagai koordinator yang menentukan arah lembaga baik dalam hal substansi penelitian, kerja sama kelembagaan, rencana dan target kelembagaan PolGov. Dalam hal administrasi dan manajerial kelembagaan, terdapat manajer yang bertanggungjawab untuk kegiatan rutin PolGov. Saat ini PolGov mempunyai lebih dari 20 peneliti yang terdiri dari peneliti senior dan junior, yang mempunyai basis keahlian beragam.

Sebagai bentuk pengembangan kelembagaan, PolGov mempunyai personil yang bertugas dalam hal publikasi dan pengelolaan media sosial. Kami sangat menyadari bahwa publikasi hasil riset merupakan hal yang sangat penting untuk penyebaran pengetahuan, tidak hanya level lokal ataupun

nasional, bahkan internasional. Tidak kalah penting, berkembangnya media sosial dalam era saat ini, membuat kami juga turut berusaha memproduksi pengetahuan tidak hanya dalam bentuk konvensional berupa buku, jurnal, monograf atau *policy paper*. Kami berusaha mengembangkan proses penyebaran gagasan melalui media sosial, produk-produk digital berupa audio dan visual kami terus produksi melalui tim media sosial PolGov.

Tim PolGov juga terdiri dari *data scientist* yang berperan penting dalam proses penelitian dengan menggunakan metode *big data analytics*. *Data scientist* ini mempunyai peran untuk proses pencarian data, pengolahan data hingga visualisasi data penelitian dengan *big data*. Harapan kami SDM yang mumpuni dalam berbagai bidang ini dapat menjadikan PolGov sebagai Knowledge Entrepreneurship Center yang mumpuni dalam bidang Politik dan Pemerintahan.

INTEREST AND EXPERTISE

Sejak 2016, PolGov membagi kegiatan riset, advokasi dan publikasi ke dalam lima topik. Kelima topik tersebut sekaligus menjadi *area of interest* dan juga *expertise* kami sebagai sebuah lembaga yang memiliki visi *knowledge entrepreneurship center*. PolGov juga menempatkan lima topik itu sebagai kerangka teoritis untuk menentukan lokus kajian yang sesuai dengan perkembangan keilmuan dan realitas politik kontemporer di Indonesia. Kelima topik kajian itu adalah:

01

Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi

Melalui topik ini PolGov mengkaji secara kritis capaian dan tantangan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. Seluruh riset dalam topik juga memiliki dimensi praktis, yakni mendukung kerangka besar gerakan demokrasi dengan memastikan demokratisasi berjalan menuju arah yang substantif untuk menyejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Selain itu, PolGov mengembangkan metodologi yang berbeda dengan metodologi arus-utama dalam mengevaluasi dan mengukur demokratisasi.

Pertama, PolGov mengembangkan pemahaman paradigmatik mengenai demokrasi dalam konteks Indonesia dengan pendekatan empiris mengkaji persoalan mana yang menjadi bagian dari keputusan demokrasi atau dipolitisasi oleh elemen pro-demokrasi. Kedua, serangkaian kajian dalam topik ini menjadi basis PolGov untuk menawarkan model demokrasi alternatif melalui isu, kepentingan dan organisasi; serta berbagai bentuk deliberasi sebagai tawaran alternatif demokrasi liberal. Ketiga, serangkaian kajian dalam topik ini menjadi basis PolGov untuk mengajukan model yang berorientasi untuk mengevaluasi dan menganalisis pilihan demokratisasi. Keempat, PolGov mengisi celah pengetahuan tentang aktor dan lembaga demokrasi di Indonesia dengan menggabungkan teori-teori kelembagaan, agensi dan kekuasaan. Gender juga menjadi perspektif dalam kajian ini.

Selain itu, kajian dalam topik ini menawarkan pengetahuan baru akan pentingnya dinamika aktual dalam mengkaji peran dan fungsi lembaga demokrasi. PolGov mengembangkan metodologi yang mengidentifikasi dan memberikan porsi pandangan para pakar terbaik pro-demokrasi sebagai instrumen untuk mengevaluasi teori dan argumen tentang demokrasi.

02 Politik Lokal

PolGov juga memiliki ketertarikan pada topik kajian Politik Desentralisasi sejak kebijakan desentralisasi digulirkan pada akhir 1999. PolGov ikut mengawal proses desentralisasi di Indonesia baik pada level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah. Beberapa dari pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan yang juga ikut mengembangkan PolGov terlibat langsung dalam penyusunan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Dalam kajian ini, PolGov mengedepankan pemahaman konteks daerah yang diletakkan dalam kerangka kepentingan yang lebih luas, yaitu daerah dan pemerintah nasional. Di level pemerintah pusat, PolGov mengawal proses desentralisasi dengan berperan sebagai konsultan yang Kementerian Dalam Negeri di masa awal penerapan kebijakan desentralisasi pasca reformasi. Kami juga terlibat di dalam *epistemic community* yang beranggotakan sejumlah mitra strategis. Koalisi untuk reformasi ini berkolaborasi di mana PolGov berperan dalam mengkritisi, menggagas, dan mengusulkan perbaikan format kebijakan desentralisasi yang lebih strategis untuk Indonesia. Sementara itu, di level pemerintah daerah, PolGov aktif dalam kegiatan riset, pelatihan, dan advokasi terkait persoalan desentralisasi politik dan pemerintahan.

Hingga akhir 2015, lebih dari seperempat dari keseluruhan kegiatan riset dan advokasi PolGov merupakan kajian Politik Desentralisasi. Sejumlah tema yang pernah dikerjakan antara lain, kajian pemekaran daerah otonom baru, desentralisasi asimetris, status keistimewaan daerah, penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah, perumusan dan pengusulan arah pengembangan pemerintah daerah, dan arah kebijakan desentralisasi pemerintah nasional.

03 Tata Kelola Industri Ekstraktif

Dalam kajian Tata Kelola Industri Ekstraktif, PolGov menempatkan sumber daya ekstraktif – minyak, gas, minerba – dan kehutanan harus dikelola secara bijak dengan mempertimbangkan aspek *energy security* (ketahanan energi), *social welfare* (kesejahteraan sosial), dan *sustainability* (keberlanjutan). Berpijak dari amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 33, sumber daya ekstraktif merupakan barang publik yang bukan sekadar komoditas dalam rantai perdagangan nasional maupun global.

PolGov mengupayakan studi tata kelola sumber daya ekstraksi dari hal yang sangat paradigmatis, yaitu: menelusuri sejauh mana gagasan ekstraksi menjadi nalar publik yang hegemonik, menggerakkan pembangunan ekonomi, dan mengondisikan seluruh aktivitas ekonomi dan sosial yang ada. Pendekatan ini melihat pengelolaan dan ekstraksi sumber daya sebagai fenomena politik, karena berada di arena pertarungan beragam kepentingan, di berbagai level yang saling interkoneksi, baik global, nasional maupun sub-nasional. Melalui pendekatan ini, teridentifikasi bahwa diskursus tata kelola sumber daya ekstraksi sangat beragam, tidak semata-mata soal manajemen tapi meluas hingga ranah yang sangat politis, dari isu kepemilikan sumber daya (seperti *resource nationalism*, politik lisensi dan rejim fiskal, dsb.) hingga terakomodasinya kepentingan publik dalam tata kelola sumber daya ekstraksi tersebut.

Melalui kajian ini, PolGov mengupayakan terobosan keilmuan dengan mencoba menghubungkan gagasan *good governance* dengan tata kelola sumber daya ekstraksi yang lebih politis. *Good governance* merupakan diskursus yang hegemonik sejak 1990-an sementara kajian politik tata kelola industri ekstraktif berusaha membongkar nalar ekstraktivisme dan mencari jalan yang melampaui ekstraktivisme.

Dari aspek praksis, topik ini menaruh perhatian pada kajian relasi antara negara, sektor privat dan masyarakat dalam konteks redistribusi dampak positif dan minimalisasi dampak negatif dalam sektor industri ekstraktif. Topik ini juga mengkaji berbagai inisiatif reformasi dalam manajemen penerimaan negara dari sektor ekstraktif seperti yang ditunjukkan oleh skema Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI), Natural Resource Charter, Topical Trust Funds for Managing Resource Wealth maupun Petroleum Governance Initiative.

04 Tata Kelola Pemilu

PolGov telah lama menaruh perhatian khusus pada topik Tata Kelola Pemilu terutama pasca reformasi, mulai dari isu tata kelola demokrasi elektoral (pemilu), hingga kajian aspek politik yang bekerja di luar prosedur kepemiluan. Dalam topik ini, PolGov mengkaji pola relasi kuasa yang muncul di seputar perhelatan pemilu.

Serangkaian riset dalam topik ini menawarkan pendekatan dan model analisis tata kelola pemilu dengan kacamata yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan mengelaborasi praktik yang berkontribusi pada terbentuknya *hybrid/defective democracy* di Indonesia, PolGov berupaya memaparkan ragam relasi kuasa di antara para aktor di balik panggung pemilu. Pendekatan ini menempatkan sistem tata kelola pemilu di Indonesia yang senantiasa tersandera praktik 'kesepakatan diam-diam' (*consensual governance*) yang mengindikasikan terus bekerjanya logika kuasa tertentu sekalipun tata kelola pemilu terus

diperbaiki dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan ‘struktural’, riset PolGov menawarkan cara pandang bahwa urusan berdemokrasi tidak sekadar menanamkan tradisi demokrasi liberal melalui sistem elektoral tetapi sekaligus menuntut strategi penciptaan dan perubahan kultur Indonesia dalam berdemokrasi.

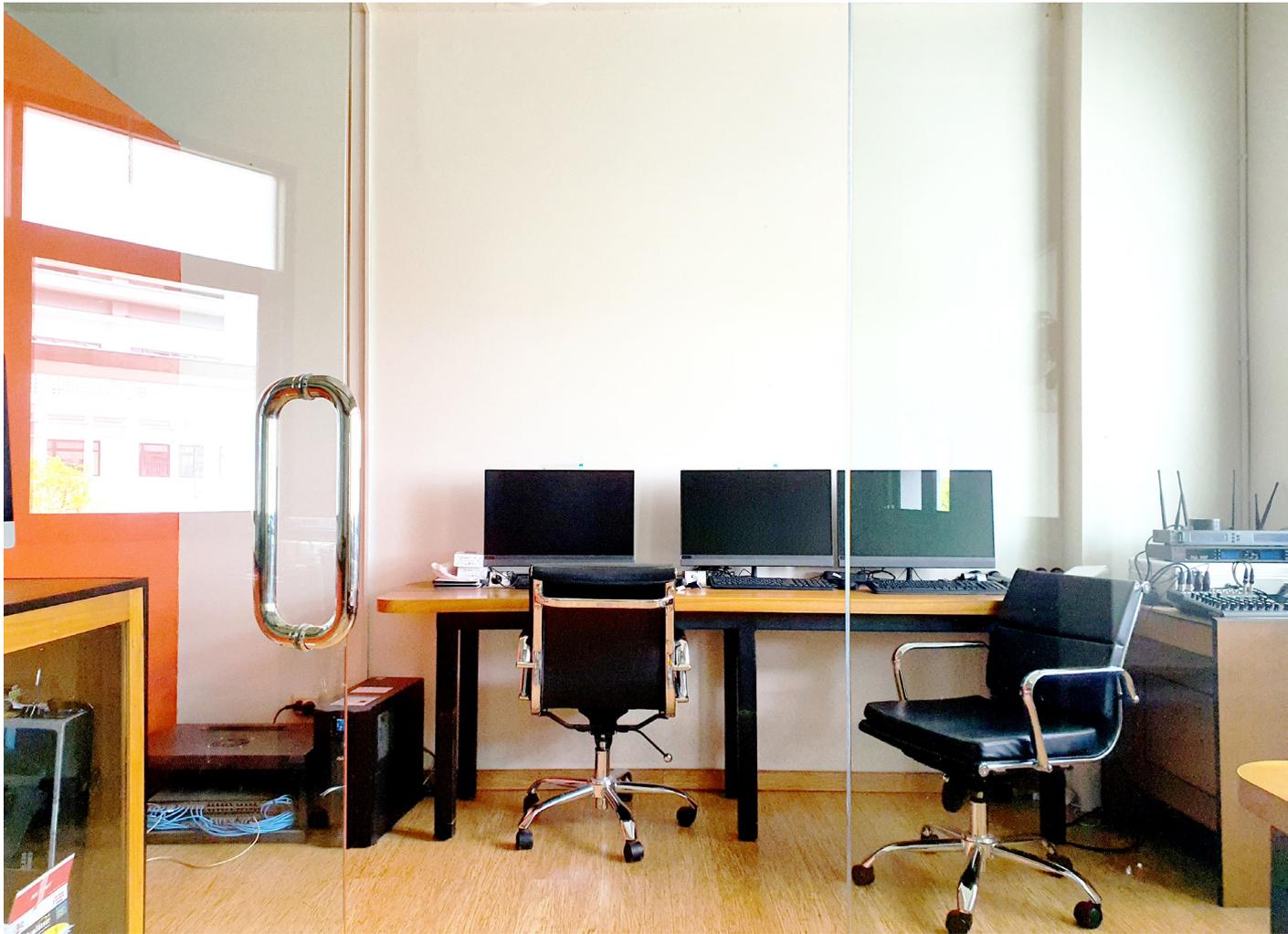
Hingga kini PolGov telah melakukan sejumlah riset, advokasi, dan publikasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan sejumlah isu yang melingkupinya, seperti politik, instrumen pendidikan politik untuk warga, dan literasi politik pemilih. Selain itu, PolGov juga mengembangkan kajian yang menjelaskan logika yang bekerja di balik pelanggaran prosedur pemilu, misalnya kaitannya dengan relasi kuasa antar aktor (patron-klien), dan lain sebagainya. Riset kajian ini terintegrasi dengan program perkuliahan DPP FISIPOL UGM yang mengembangkan konsentrasi Tata Kelola Pemilu sebagai konsentrasi studi S2 Politik dan Pemerintahan.

05 Tata Kelola Perbatasan

Dalam topik ini, PolGov berupaya untuk mengisi celah pengetahuan pada kajian pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia. Selama ini, kajian lintas-batas di Indonesia belum mendapat perhatian yang luas, baik dari komunitas akademis maupun pembuat kebijakan. Kawasan perbatasan cenderung terbengkalai karena dianggap sebagai halaman belakang negara sehingga operasionalisasi terhadap tata kelola lintas batas belum menjadi prioritas. Padahal, perbatasan adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara-bangsa.

Tujuan utama riset topik ini adalah membangun *frameworks* tata kelola lintas perbatasan (*cross-border governance*) yang berbasis pada pemetaan pengetahuan yang telah ada dan berdasarkan realitas lapangan. Kajian ini mengupayakan masukan akademis bagi pengambil kebijakan terkait pengelolaan kawasan perbatasan, tidak hanya bagi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), tetapi juga *stakeholders* lainnya seperti pemerintah daerah di wilayah perbatasan. PolGov menggunakan topik ini sebagai kerangka analisis untuk terlibat aktif dalam kelompok kerja kajian perbatasan dan menjalin kemitraan strategis, baik dengan lembaga internal kampus maupun eksternal.

Berpijak pada riset topik ini, PolGov menawarkan transformasi paradigmatik dalam mendefinisikan dan memperlakukan perbatasan, yaitu transformasi dari paradigma *hard border* ke *soft border*. Pendekatan ini mendorong pemahaman diskursif terhadap keragaman rezim dan pengetahuan yang mengonstruksi perbatasan dari kedua belah sisi perbatasan. Pemahaman diskursif ini, pada gilirannya, akan menjadi basis bagi upaya membangun kesepakatan intersubjektif yang menjadikan perbatasan, pengelolaan, dan pembangunannya menjadi perhatian bersama.



BIG DATA ANALYTICS

Mulai 2018, Departemen Politik dan Pemerintahan menginisiasi pembentukan Laboratorium *Big Data Analytics*. Laboratorium ini merupakan laboratorium penelitian interdisipliner yang berfokus pada pemanfaatan teknologi data dalam ilmu sosial atau *social data science*. Laboratorium ini dibangun atas kesadaran terhadap perkembangan teknologi

informasi serta sebagai bentuk inovasi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian di era keberlimpahan informasi digital. Adapun, laboratorium saat ini masih berada dalam tahap pengembangan, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun manajemen data.

Walaupun masih dalam tahap pengembangan, laboratorium ini dapat melakukan berbagai tugas komputasi dan visualisasi untuk mendukung penelitian sosial dan politik dengan mangkus dan sangkil. Kami melakukan analisis terhadap berbagai jenis data bandang, seperti data media sosial Twitter, media *online* baik dalam maupun luar negeri, serta berbagai data publik yang berasal dari berbagai sumber seperti data demografi, data konflik, data korupsi, data kepemiluan, dan lain sebagainya

Berbagai penelitian telah dihasilkan melalui laboratorium ini, seperti penelitian tentang tata kelola pemilu, tata kelola sumber daya alam, dan demokrasi. Pada tahun 2019, kami melakukan kajian serial tentang Pemilu Presiden tahun 2019 dengan berbagai topik seperti isu golput, legitimasi pemilu, politik uang, dan isu negatif dalam pemilu. Selain itu, kami juga melakukan kajian tentang Gejayan Memanggil sebagai sebuah gerakan sosial.

Pada tahun 2020, ada tiga kajian utama yang telah kami lakukan. Pertama, topik penanganan covid-19 seperti kepercayaan

publik terhadap upaya penanganan oleh pemerintah dan koordinasi pemerintah pusat-daerah dalam penanganan covid-19. Kajian atas topik tersebut menghasilkan *policy paper* sebagai tawaran alternatif solusi bagi pemerintah untuk perbaikan tata kelola penanganan covid-19. Kedua, *social network analysis* (SNA) dalam korupsi sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini merupakan kerja sama antara Departemen Politik dan Pemerintahan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghasilkan rekomendasi model pencegahan korupsi sumber daya alam di masa depan. Ketiga, Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. Penelitian ini berfokus pada beberapa isu seperti perdebatan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, netralitas ASN, dan komodifikasi isu covid-19 dalam Pilkada 2020. Penelitian tersebut menghasilkan monograf yang berguna sebagai catatan penting pembelajaran penyelenggaraan di masa lalu dan perbaikan tata kelola pemilu di masa depan.

MEDIA DAN PUBLIKASI

Dalam rangka mendiseminasikan hasil kegiatan, visi dan misi yang dimiliki, PolGov memiliki unit publikasi yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian, pembelajaran, pengabdian masyarakat dan advokasi di lingkungan Departemen Politik dan Pemerintahan. Unit ini secara profesional mengelola naskah dari karya-karya berkualitas unggul para civitas academica, baik mahasiswa, dosen, maupun peneliti untuk diterbitkan menjadi buku, monograf maupun jurnal.

Produk terbitan PolGov dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan referensi rujukan bagi para peneliti maupun literatur akademis bagi para mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Terbitan PolGov juga banyak mengangkat sejumlah isu kontemporer di Indonesia dan Asia Tenggara, seperti pergerakan politik dan dinamika pemerintahan yang dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain itu, secara khusus unit ini juga mengelola dua jurnal yakni Jurnal PCD dan Jurnal PolGov.



Pertama, Jurnal PCD merupakan jurnal internasional berbahasa Inggris yang menyajikan karya-karya penelitian berkualitas unggul para pakar dan ahli khusus bertema Power, Conflict, and Democracy (PCD) dalam konteks negara belahan selatan dunia. Jurnal ini juga merupakan bagian dari jejaring yang melibatkan Universitas Gadjah Mada di Indonesia, the University Colombo di Sri Lanka, and the University of Oslo di Norwegia. Jurnal ini diinisiasi setelah adanya kerja sama antara Departemen Politik dan Pemerintahan dengan Pemerintah Norwegia lewat Power, Welfare and Democracy (PWD) Project pada 2008.

Adapun, Jurnal PolGov merupakan media penyebaran hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang politik dan pemerintahan guna memfasilitas diskusi, interaksi dan pertukaran informasi di antara para ahli dan antara para ahli dan pengambil kebijakan. Jurnal ini terbuka bagi siapa pun yang memiliki minat dan keahlian dalam bidang politik dan pemerintahan. Setiap naskah yang diterbitkan telah melalui proses blind peer review yang melibatkan para ahli dan akademisi yang terkait.

Unit Publikasi juga memiliki sub divisi media yang mengelola sejumlah akun media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram serta TikTok yang dimiliki oleh DPP. Tak hanya itu, merespons laju perkembangan teknologi, cara generasi mengonsumsi dan memproduksi pengetahuan, tim media juga memproduksi sejumlah konten berbentuk audio visual

secara mandiri, baik untuk kepentingan materi kuliah, eksposur lembaga maupun untuk menyebarkan visi dan misi dan nilai yang dipercayai. Singkatnya, produksi tim media diharapkan bisa mengamplifikasi hasil-hasil penelitian, advokasi dan juga pelatihan serta memberikan nilai tambah yang dilakukan.

Tim ini didukung oleh anggota yang handal, kompeten dan berpengalaman dalam memproduksi serta menyunting video, membuat desain grafis, menyusun naskah dan story board, serta membuat konten audio seperti podcast. Dalam memproduksi konten, selain mendapat dukungan alat-alat yang memadai, tim media saat ini juga telah memiliki fasilitas studio rekaman yang bisa digunakan secara mandiri untuk memproduksi konten-konten seperti video, foto dan juga podcast. Studio Rekaman Departemen Politik dan Pemerintahan dibangun pada 2020 dan saat ini telah digunakan untuk memproduksi berbagai macam konten video dan audio.

MENGINTE-GRASIKAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Selain fokus terlibat dalam memproduksi ilmu pengetahuan dan terlibat dalam mengadvokasi kepentingan publik, PolGov juga tak melupakan tugasnya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat lewat pengembangan pendidikan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh PolGov dilakukan secara terintegrasi dengan produksi pengetahuan lewat berbagai riset dan juga advokasi yang dilakukan. Hal ini ditempuh melalui berbagai kegiatan yang dilakukan seperti terlibat aktif dalam produksi penelitian dan juga advokasi



atau PCD Journal. Jurnal PolGov yang pertama kali terbit pada 2019 ini, menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mengirimkan naskah ilmiah yang mereka miliki termasuk naskah ilmiah yang berasal dari tugas akhir seperti skripsi dan juga tesis. Tak hanya itu, PolGov pun secara rutin juga menerbitkan buku yang berasal dari karya tugas akhir mahasiswa. Langkah ini merupakan usaha PolGov untuk mendorong mahasiswa menyusun karya ilmiah yang baik sekaligus mendiseminasikan karya mahasiswa kepada khalayak yang lebih luas.

Selain itu, sejumlah riset dan advokasi yang dihasilkan oleh PolGov juga menjadi salah satu acuan bagi Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) dalam menyusun kurikulum dalam proses perkuliahan. Hal ini dilakukan supaya transfer pengetahuan dan juga mata kuliah yang diajarkan sejalan dengan perkembangan ilmu khususnya dalam langgam sosial dan politik. Kebijakan tersebut juga dijalankan dengan semangat bahwa kurikulum DPP bisa merespons dan sejalan dinamika sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat untuk menghindari kejumudan. Sejumlah mata kuliah dan fokus studi di DPP yang terinspirasi dari sejumlah hasil riset misalnya, Agama dan Tata Politik, Politik Sumber Daya Alam, Politik dan Teknologi, Tata Kelola Pemilu serta HAM dan Kewarganegaraan.

Lebih jauh, PolGov juga terlibat dalam melakukan riset dan juga menjadi fasilitator dan tim penilai di dalam pelaksanaan

demokrasi lokal, yakni pada level desa dalam pemilihan perangkat desa dan juga kepala desa (Pilkades). Dilaksanakan sejak 2017, keterlibatan PolGov tersebut dilakukan pada sejumlah desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kolaborasi ini juga merupakan upaya PolGov untuk mendorong demokratisasi sampai level desa sekaligus mengenalkan praktik meritokrasi dan *evidenced based policy* dalam pembuatan kebijakan pada level desa.

Tak hanya itu, PolGov pun terlibat di dalam riset yang fokus untuk ikut menanggulangi persebaran berita bohong atau hoaks yang tengah marak pada 2015. Riset yang diselenggarakan pada 2018 hingga 2019 dan bekerja sama dengan TIFA ini menghasilkan sejumlah rekomendasi dan juga strategi guna mencegah menyebarnya hoaks di masyarakat khususnya di media sosial. Bekerja sama dengan sejumlah lembaga *non-government organization* (NGO) di dua kota yakni Ambon dan Bandung, riset ini berfokus untuk mengadvokasi warga untuk yang memiliki hak pilih untuk menjadi para pemilih cerdas khususnya menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. Dengan pengetahuan tentang hoaks diharapkan para warga yang memiliki hak pilih dalam Pemilu bisa memilah berita dan informasi serta terhindar dari kabar bohong di tengah derasnya arus informasi di media sosial.



MITRA KERJA

PolGov mendapatkan dukungan kelembagaan dari lingkungan internal UGM juga dari kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, termasuk institusi pendidikan nasional maupun internasional. Selain mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, kerja sama ini juga menjadi bagian dari jaringan advokasi kebijakan di tingkat regional, nasional, maupun internasional terhadap isu strategis seperti pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan perbatasan, kesejahteraan, dan demokrasi.

Sejumlah institusi pemerintah dan non-pemerintah yang pernah bekerja sama dengan kami antara lain Kementerian Riset dan Teknologi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, KPU, Kedutaan Besar Norwegia, University of Oslo, Australian National University, Smeru Institute, Bank Dunia, UNDP, Kemitraan, DRSP USAID, Yayasan Tifa, IDEA Internasional, IRI,

NUFU, ODI, Revenue Watch Institute, The Asia Foundation, The Australian Electoral Commission, Natural Resource Governance Institute, KSI, Norwegian University of Science and Technology's, Bank Rakyat Indonesia, Telkom Indonesia.

Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan daerah, antara lain: Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di DIY, Pemkab Magelang, Pemkab Purworejo, Pemkab Grobogan, Pemkab Blitar, Pemkab Wonosobo, Pemkab Puncak Jaya, Pemkab Puncak, Pemkab Lombok Timur, Pemkab Flores Timur, Pemkot Tidore Kepulauan, Pemkab Boven Digoel, Pemkab Sorong Selatan, Pemkab Mentawai, Pemkab Buru, Pemkab Halmahera Timur.

POLGOV

Research Center for Politics and Government

Kontak Kami

Research Center for Politics and Government (PolGov)
Gedung BA Lt. 4, Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM
Jl. Socio Yustisia No. 2, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281

Telepon / Fax : +62-274-555880

Surel : polgov@ugm.ac.id

Situs : polgov.fisipol.ugm.ac.id
dpp.fisipol.ugm.ac.id